

**ANALISIS GEOPOLITIK ABAD 21 DI INDO-PASIFIK DAN PERSIAPAN INDONESIA
DALAM MENYIKAPI KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN**

**ANALYSIS OF 21ST CENTURY GEOPOLITICS IN THE INDO-PACIFIC AND
INDONESIA'S PREPARATIONS IN RESPONDING TO THE CONFLICT IN THE
SOUTH CHINA SEA**

AZIZ ALI HAERULLOH¹, RIFQI FAKHRIAN MARTANI²

¹Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan Republik Indonesia
aziz.haerulloh@sp.idu.ac.id

²Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
rifqi16007@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keadaan Laut Cina Selatan (LCS) dan Laut Natuna Utara yang mulai digaungkan penamaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 2017, ketika Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Bagi Indonesia, Laut Natuna Utara merupakan bagian dari LCS yang menjadi sengketa antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN. Tiongkok yang terus menerus melakukan klaim dan provokasi di LCS, membuat situasi konflik menjadi semakin memanas. Keadaan terbaru memperlihatkan bahwa 5 kapal milisi sipil Tiongkok melakukan provokasi dengan mendekati diri ke arah kapal-kapal ASEAN yang sedang melakukan latihan formasi maritim bersama dengan India. Melihat klaim dan provokasi yang sering dilakukan oleh Tiongkok di LCS, maka Indonesia perlu mempersiapkan fasilitas dan strategi yang dapat menunjang pertahanan dan keamanan di sektor maritim. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang dipersiapkan untuk menunjang sektor maritim Indonesia terbilang kecil dibandingkan dengan anggaran yang dipersiapkan Tiongkok. Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia, karena sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan pendekatan studi kasus dan didukung pengumpulan data melalui studi literatur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *teori balance of power* yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dan konsep keamanan dari Barry Buzan dkk. Indonesia diharapkan mampu melakukan tindakan preventif apabila terjadi *spillover* konflik di LCS khususnya Kogabwilhan I dengan berbagai unsur strategis dan taktis.

Kata Kunci: Laut Cina Selatan, Laut Natuna Utara, Konflik Perbatasan, Indonesia, Tiongkok.

ABSTRACT

The research conflicts with the conditions of the LCS and the Northern Natuna Sea, which began to be named by the Government of the Republic of Indonesia in 2017 when Susi Pudjiastuti served as the Minister of Marine Affairs and Fisheries of Indonesia. For Indonesia, the Northern Natuna Sea is part of the LCS, which is a dispute between China and the ASEAN countries. China's ongoing claims and provocations in the LCS have made the conflict situation warmer. The latest situation shows that five Chinese civilian militia ships are provoking ASEAN ships that are conducting maritime formation exercises with India. Given the frequent claims and provocations made by China in the LCS, Indonesia needs to prepare facilities and strategies that can support defence and security in the maritime sector. Indonesia, as we know it, is one of the largest maritime states in the world because most of its territory is oceanic. The research uses qualitative descriptive methods based on case study approaches and supports data collection through literature studies. The theories used in this research are the theory of balance of power proposed by Hans J. Morgenthau and the concept of security proposed by Barry Buzan. Indonesia is expected to be able to take preventive action when there is a spillover conflict in the LCS, in particular Kogabwilhan I, with various strategic and tactical elements.

Keywords: South China Sea, North Natuna Sea, Border Conflict, Indonesia, China.

PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan (LCS) yang menjadi wilayah strategis di Asia Tenggara, pun menjadi wilayah penting bagi Indonesia sejak era kolonial Hindia Belanda (1799-1942). Referensi tertua yang menyebutkan Laut Natuna adalah Peta Laut No. 147 edisi Maret 1929 yang edisi pertamanya diterbitkan pada 1909 oleh *Manisterie Van Marine, Afdelling Hydrographie*. Nama Natuna dituliskan sebagai *Zuid Natoena Eilanden* (Kepulauan Natuna Selatan). Lokasinya berada di sebelah barat Pulau Subi Besar dan *Groot Natoena Eilanden* (Kepulauan Natuna Besar) berada di sebelah barat Pulau Bunguran Besar (Pulau Natuna) (Susmoro, 2019).

LCS yang berbatasan secara langsung dengan Laut Natuna Utara memiliki beberapa konsekuensi konflik perbatasan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan menyiagakan wilayah Kabupaten Natuna menjadi pangkalan militer terpadu tiga mata, memiliki proyeksi kekuatan ke arah Laut Natuna Utara yang berhadapan langsung dengan LCS yang menjadi tempat hilir mudiknya kapal nelayan Tiongkok (*militia*) dan kapal *Coast Guard* (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2023).

Indonesia menyediakan Komando Armada 1 yang berpangkalan di Tanjung Pinang, Riau serta unsur gabungan melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) 1 yang bermarkas di Tanjung

Pinang, Riau. Unsur-unsur strategis direlokasi yang semula di Jakarta ke Riau untuk mendekatkan markas komando dengan wilayah operasi potensial di masa yang akan datang yakni Laut Natuna Utara. Meskipun Indonesia bukan negara yang secara langsung terlibat dalam konflik di LCS, namun *spillover* konflik yang harus diantisipasi sebelum menjadi perang terbuka yang masif.

Upaya agresif dan asertif Tiongkok di LCS merupakan proyeksi kekuatan Tiongkok ke wilayah Asia Tenggara, ASEAN sebagai lembaga resmi negara-negara di Asia Tenggara berusaha untuk menjaga agar konflik klaim perbatasan tetap berada di dalam koridor damai melalui media diplomasi. Tidak bisa dipungkiri meskipun sudah terdapat *Code of Conduct* (CoC) yang berkaitan dengan konflik LCS, negara yang berkonflik tidak memiliki titik temu yang bersifat final dan mengikat semua belah pihak. Tiongkok pada dasar hukumnya sudah meratifikasi UNCLOS 1982 namun tidak serta merta mereka menerima putusan mahkamah arbitrase internasional mengenai putusan konflik klaim LCS dengan beberapa negara ASEAN pada 2016 (Adi, 2020).

Penelitian ini dilakukan karena Indonesia sudah seharusnya memperkuat basis pertahanan aktif berlapis, berdasarkan spektrum ancaman yang dinamis bukan hanya yang bersifat atas permukaan laut, permukaan laut, dan bawah permukaan laut yang sangat rentan disusupi oleh armada musuh seperti kapal selam, *unmanned underwater vehicles*

(UUV), dan misil/peluru berkendali jarak jauh. Strategi Kogabwilhan I yang bertanggung jawab di wilayah sekitar Laut Natuna Utara, memiliki fasilitas pangkalan darat, laut, dan udara terdepan (statis), serta pangkalan dinamis dalam bentuk kapal induk *drone* yang bisa Indonesia miliki sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan potensi kehadiran di laut yang berbanding lurus dengan menjaga *Sea Lines of Communication/Trade* (SLOC/T) secara lebih proaktif. Contoh terkini seperti Turki yang mengembangkan kapal induk *drone* yang bisa Indonesia tiru dan aplikasikan untuk menekan biaya operasional yang tinggi. Sehingga dengan pengembangan alutsista dan anggaran dalam bidang maritim, diharapkan Indonesia mampu melakukan tindakan preventif apabila terjadi *spillover* konflik di LCS secara lebih efisien dalam hal anggaran.

Indonesia saat ini memiliki keterbatasan dalam penyediaan radar (*coastal radar surveillance facility*) dan sonar yang digunakan oleh armada patroli. Baik dari segi jumlah maupun daya jangkau merujuk pada target MEF tahap III 2020-2024.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penerapan studi kasus dalam meramalkan (*forecasting*) yang bertujuan untuk mempersiapkan infrastruktur fisik dan non-fisik yang kemungkinan besar akan dibutuhkan oleh negara secara khusus TNI AL sebagai garda terdepan pertahanan di domain

maritim. Studi *forecasting* menjelaskan kecenderungan paradigma yang terjadi di negara-negara sekitar LCS adalah meningkatnya alokasi belanja pertahanan negara dalam 5-10 tahun terakhir dan menguatnya minilateralisme sejak paruh kedua abad 20 serta awal abad 21 seperti AUKUS (2021), QUAD (2004), SEATO (1954), dan ANZUS (1951) (Department of State, 1952).

Pengumpulan sumber menggunakan studi literatur, baik berbentuk arsip, berita, audio, video maupun laporan hasil penelitian dalam jangka waktu 5-10 tahun terakhir.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep keamanan negara dapat diartikan secara negatif dan positif (Buzan & Hansen, 2009). Dalam arti negatif keamanan negara adalah keadaan dimana negara tidak terkena ancaman secara langsung dan mendesak sedangkan dalam arti positif keamanan negara merupakan suatu keadaan dimana pertahanan wilayah dan nilai-nilai dapat dipastikan keamanannya dengan keadaan institusi terkait berfungsi dengan baik dan populasi dapat dilindungi. Lalu, terdapat juga teori *referent object* (objek rujukan) dalam konsep keamanan yang mengatakan bahwa objek yang terlihat terancam secara eksistensial dapat memiliki klaim secara sah untuk mempertahankannya, dalam hal ini objeknya adalah negara (Buzan et al., 1998). Adapun terdapat 3 upaya untuk menciptakan keamanan negara, yaitu (Bainus, 2023):

1. Menghilangkan kemungkinan ancaman
2. Memastikan keteraturan dan koherensi internal
3. Menjamin keadilan dan keamanan warga negara

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *balance of power* yang menjelaskan bahwa negara-negara saling berperang dan melakukan penyeimbangan kekuatan guna mengimbangi kekuatan negara lain (Morgenthau, 1949). Ketika suatu negara meningkatkan kekuatan militernya secara signifikan, maka negara lain menganggap dan mencurigai hal tersebut sebagai ancaman potensial. Sama seperti yang terjadi saat ini antara Tiongkok, negara-negara ASEAN, dan negara luar kawasan yang berkepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Geopolitik Indo-Pasifik

Indo-Pasifik menjadi perhatian bagi sebagian besar para pemimpin politik dunia berkat daya tarik ekonominya yang luar biasa besar dan belum banyak dieksplorasi sumber daya alamnya. Indo-Pasifik memiliki daya tawar ekonomi dan politik, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya (ANZUS, QUAD & AUKUS) di Indo-Pasifik dalam beberapa kasus memiliki atensi yang besar berkat inisiasi Tiongkok yang sangat masif di Asia yang memiliki pengaruh dari program *Belt and Road Initiative* (BRI). Dilihat dari geopolitik kawasan Indo-Pasifik inisiasi Tiongkok adalah bentuk upaya

menyaingi dominasi AS sebagai pemilik status quo.

“Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1904-1944), diartikan sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi *Geographical Politic*” (Sulisworo et al., 2012).

Indonesia sebagai negara *archipelago* yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara salah satu bagian integral dari kawasan Indo-Pasifik, tidak bisa lepas dari perebutan pengaruh antara Tiongkok (BRI) dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang digagas ASEAN +3 bersaing dengan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang diinisiasi oleh AS. Perebutan hegemoni geopolitik saat ini tidak lagi dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme gaya lama tetapi melalui kerjasama ekonomi. Indonesia yang memiliki sistem politik luar negeri bebas aktif dapat menyeimbangkan perebutan pengaruh tersebut.

Indonesia saat ini sedang dalam masa kepemimpinan ASEAN 2023, sehingga memungkinkan untuk membedah masalah yang rumit mengenai Indo-Pasifik sebagai kawasan yang sedang tumbuh dan disertai konflik yang memanas. Membedah kembali hasil pemikiran pendahulu salah satunya “pemikiran geopolitik Soekarno secara empirik telah terbukti memberikan landasan pijak dan sebagai *alternative of view* dalam membangun tata dunia internasional yang mengedepankan kemanusiaan, keadilan, persahabatan antar

bangsa bagi perdamaian dunia” (Kristiyanto, 2023). Oleh karena itu, Indonesia mempromosikan kerjasama untuk membangun tatanan dunia baru yang penuh kedamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain sebagai mitra yang setara (*mitreka satata*). *Mitreka Satata* memiliki arti selalu bersahabat atau sahabat yang sederajat (Umami, 2013).

Negara ASEAN diharapkan mampu menjalin beberapa program kerjasama keamanan maritim secara keseluruhan untuk membangun kepercayaan antar sesama anggota secara konkret (Octavian, 2023). Hubungan yang dibangun dilandasi oleh rasa saling menghormati satu sama lain sebagai mitra yang setara tanpa ada *patron & client*.

Indo-Pasifik saat ini tengah berusaha untuk meminimalisir konflik yang memuncak dengan tindakan asertif Tiongkok di LCS, beberapa kepulauan yang diklaim telah menimbulkan masalah saling-silang sengketa. Situasi geopolitik ini menjadi perhatian serius beberapa negara di berbagai kawasan dunia lainnya. AS dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) saat ini memberikan atensi lebih mengenai eskalasi konflik di LCS, beberapa negara membuka kesempatan untuk keterlibatan secara langsung AS (USINDOPACOM), Inggris, Australia, India, dan Jepang yang beraliansi dengan sekutu.

Tiongkok sebagai kekuatan baru mendapatkan dukungan dari Rusia dan Korea Utara yang secara ideologi berseberangan

dengan AS dan sekutunya. Ketegangan ini membawa Tiongkok pada konflik yang semakin dalam seperti upaya invasi Taiwan untuk berada di dalam pengaruh dan kekuasaan Tiongkok secara keseluruhan. Wilayah kepulauan dan laut di LCS menjadi titik sentral sehingga perlu mendapatkan atensi secara lebih intens untuk bisa diselesaikan secara damai supaya tidak berujung pada konflik seperti perang terbuka.

LCS menjadi wilayah yang memiliki jumlah perdagangan internasional yang sangat besar terutama bagi kawasan Asia Timur yang saat ini menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Selat Malaka sebagai *choke point* yang berhubungan dengan LCS memiliki 40% perdagangan internasional.

Permasalahan LCS termasuk “Studi geopolitik berhimpitan dengan pertahanan negara dan secara intrinsik memuat aspek geostrategis. Geostrategis menurut Zbigniew adalah manajemen strategis untuk geopolitik” (Kristiyanto, 2023). Secara politik internasional, geopolitik ini memberikan manajemen strategis yang membuat masalah di kawasan mendapatkan solusi secara tepat guna. Samudera Hindia dan Pasifik akan membawa kemakmuran bagi semua negara apabila dapat dikelola secara baik dan berkelanjutan.



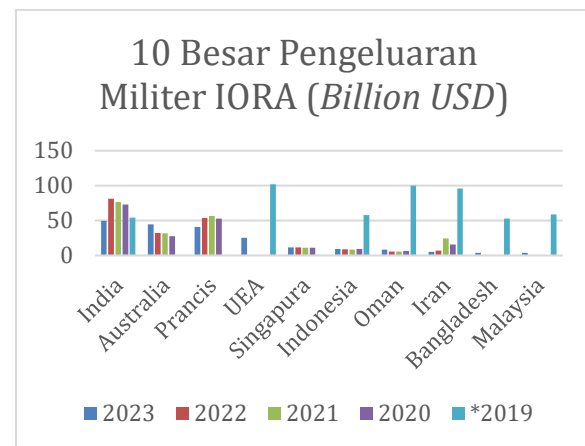
Gambar 1. *Regional Comprehensive Economic Partnership*

Sumber: (Martin, 2021).

RCEP memiliki jumlah volume perdagangan yang terbesar di Indo-Pasifik dibandingkan dengan kerjasama ekonomi lainnya. Tiongkok saat ini menjadi mitra dagang utama negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, serta Australia dan Oseania. AS berusaha menyeimbangkan melalui skema IPEF dengan memberikan stimulus terhadap negara-negara mitra, kendati AS melakukan upaya penangkalan tetapi Tiongkok lebih kuat secara fundamental dalam membangun kerjasama ekonomi di kawasan.

Apabila dianalisis menggunakan teori *balance of power* akan terlihat upaya AS dibidang ekonomi menguat seiring dengan kehadiran militernya, AS menarik pasukan di Afghanistan di era Presiden Trump dan saat ini

berfokus pada Indo-Pasifik dengan ancaman laten Korea Utara dan Tiongkok. Biaya mahal harus dialokasikan oleh AS setiap tahunnya untuk mendapatkan update informasi intelijen dari Korea Selatan mengenai ancaman peluncuran *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM) milik Korea Utara jika diluncurkan untuk menyerang AS.



Sumber: (SIPRI, 2019, 2021, 2022, 2023).

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa perlombaan senjata sedang terjadi dengan meningkatnya anggaran pertahanan secara simultan diantara beberapa negara di kawasan. Selanjutnya, data ini belum termasuk *major power* (Tiongkok dan AS) dari segi nominal yang jauh lebih besar.

1.2 Potensi Perang Laut Cina Selatan

Seperti yang diketahui bersama, konflik klaim LCS dari tahun ke tahun semakin memanas. Hal tersebut, tentu saja terjadi bukan tanpa sebab, melainkan sudah lama sekali terjadi. Klaim Pemerintah Tiongkok terhadap LCS sudah terjadi sejak akhir Perang Dunia II. Pada saat itu, tidak ada satupun negara yang mengklaim LCS. Penentuan sebelas garis putus-putus (*U-shaped eleven-*

dash line) yang ditampilkan pada peta Tiongkok tahun 1947 merupakan sebuah klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok dengan tujuan membenarkan kepemilikan Tiongkok atas LCS (Thontowi, 2018).

Sedangkan sengketa LCS pertama kali terjadi pada sekitar tahun 1970-an, akan tetapi konflik tidak menemui titik akhir hingga sekarang. Negara-negara ASEAN, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam adalah *claimant states* yang menggunakan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) dalam mengklaim dasar-dasar geografis di LCS, sedangkan Tiongkok menggunakan dasar historis dan kehadiran aktif dalam mengklaim dasar-dasar geografis pada LCS (Sulistiyani et al., 2021).

LCS merupakan kawasan laut yang diperebutkan karena memiliki nilai strategis sebagai *Sea Lines of Trade* (SLOT) dan *Sea Lines of Communication* (SLOC) yang menghubungkan antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Octavian, 2023). Hal tersebut membuat LCS menjadi jalur tersibuk di kawasan Asia bahkan dunia, karena hampir rata-rata lalu lintas perdagangan maritim melewati jalur tersebut (Utomo et al., 2017).

Selain itu, kawasan LCS juga memiliki sumber daya seperti minyak dan gas alam, sehingga setiap *claimant states* sangat berusaha untuk mempertahankan kepentingan mereka masing-masing dengan melakukan berbagai macam manuver, seperti Tiongkok dengan *nine dash line* nya dan

gugatan Filipina terhadap Tiongkok melalui PBB karena tindakan asertif Tiongkok dengan melakukan pembangunan pulau-pulau buatan dan kehadiran militer di kawasan LCS. Hal tersebut bahkan menyebabkan keterlibatan Amerika Serikat dengan meningkatkan kegiatan *Freedom of Navigation Operation* (FONOPS) di kawasan LCS (Hutama, 2019).

Pada mulanya, ketika konflik LCS terjadi, Indonesia tidak terlibat sama sekali dalam konflik tersebut. Indonesia menjadi negara yang menginisiasi perundingan-perundingan penyelesaian konflik yang terjadi di LCS seperti pada 1990, Indonesia menginisiasi sebuah *workshop* yang berjudul *Management of Potential Conflict in the South China Sea* (Toruan, 2020). Selanjutnya, Indonesia juga menggagas pembentukan *ASEAN Security Community* (ASC) yang ditandatangani di Senggigi, Lombok pada 12 September 2003. Pembentukan ASC menjadi kunci dalam menjaga keamanan dan ketertiban kawasan ASEAN khususnya LCS, dengan cara melaksanakan diplomasi pertahanan antar Negara ASEAN maupun luar lingkup ASEAN.

Keberhasilan Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menciptakan dan memantapkan stabilitas geopolitik di Asia Tenggara merupakan tujuan utama dari berdirinya ASEAN, dengan program *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Pada KTT ke-25, ASEAN menyambut hangat keinginan berbagai pihak non-ASEAN untuk bergabung dalam TAC,

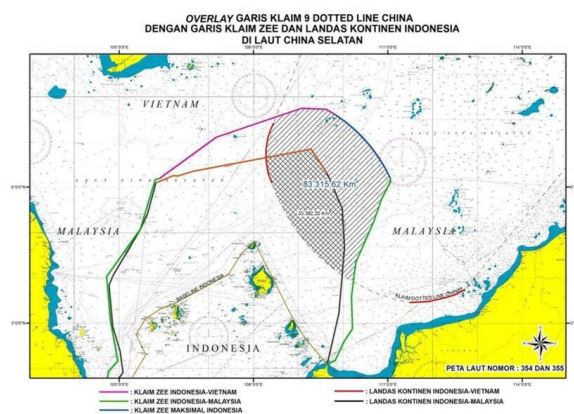
karena menurut ASEAN penting untuk mensinergikan berbagai proposal keamanan di kawasan.

Pada 2020 dalam kebijakan pertahanan negara, Indonesia melakukan pembangunan pertahanan tahunan, yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali yang diperlukan untuk mengelola seluruh sumber daya nasional dan infrastruktur nasional demi mencapai tujuan pertahanan negara dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya Indonesia berpedoman pada Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang tertulis dalam Undang-undang RI No. 34 Tahun 2004. Adapun tujuan politik dari pelaksanaan Sishankamrata yang dimaksud adalah untuk menunjukkan kekuatan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional (Nugraha, 2021).

Namun pada 2010, Indonesia mulai terseret konflik LCS dikarenakan Tiongkok mulai melakukan klaim wilayah utara Kepulauan Natuna yang merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Sedangkan Tiongkok mengklaim bahwa perairan Natuna Utara merupakan bagian dari traditional *fishing zone*. Hal tersebut menyebabkan Indonesia mulai bersitegang dengan Tiongkok, hingga puncaknya pada 2016 ketika Indonesia mulai menenggelamkan kapal-kapal nelayan Tiongkok yang menurut Indonesia melakukan kegiatan *IUU Fishing*. Tindakan Indonesia tersebut, selama rentang waktu 2016-2018 terhadap kapal-kapal nelayan Tiongkok ilegal

mulai berkurang melakukan tindakan tersebut. Tetapi semenjak pergantian pemerintahan pada 2019, kapal-kapal Tiongkok mulai kembali memasuki perairan Indonesia, bahkan kali ini melibatkan *coast guard* secara lebih aktif dan provokatif dari Tiongkok (Rosana, 2020).

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan bahwa Tiongkok tidak mempunyai dasar hukum untuk mengklaim perairan LCS sebagai miliknya. Namun, Tiongkok terus mengabaikan keputusan-keputusan dunia Internasional. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat konflik LCS menjadi semakin panas. Ditambah dengan keikutsertaan Amerika Serikat sebagai negara ketiga yang tidak memiliki permasalahan dalam klaim di LCS. Amerika Serikat dan Tiongkok semenjak berakhirnya perang dingin, telah memulai babak baru dalam persaingan menjadi negara adidaya (*super power*).



Gambar 2. Peta Ilustrasi *Overlay* Garis Klaim *Nine Dash Line* Tiongkok dengan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia

Sumber: (Nugraha, 2021).

Berdasarkan data dari Rencana Strategis Bakamla 2020-2024 wilayah laut Natuna Utara termasuk kategori Daerah Operasi Maritim D yang memiliki prioritas di bidang keamanan maritim, kerjasama antar agensi (pemerintah), dan kerja sama antar negara (Bakamla, 2020).

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik LCS, tentu saja membuat kondisi konflik semakin tidak kondusif yang memungkinkan bisa memulai terjadinya konflik terbuka. Terlihat dengan mulai munculnya pangkalan-pangkalan militer (*naval base*) di LCS ataupun di wilayah sekitarnya di Asia Tenggara. *Naval base* merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam menghadapi situasi perang, karena *naval base* sendiri berfungsi untuk melakukan komando pengendalian dan pengawasan (*command, control, and communication*) wilayah sekitar. Dalam usahanya untuk memperkuat pengaruhnya di LCS, Tiongkok telah melakukan reklamasi gugusan atol di *Subi Reef, Fiery Cross, Mischief Reef*, dan Pulau Woody di gugusan Kepulauan Spratly yang sekarang telah menjadi pangkalan militer terpadu.

Konflik yang berlangsung di LCS jika dibiarkan terus menerus dapat menyebabkan timbulnya konflik yang lebih besar lagi, karena LCS telah menjadi *trouble spot* yang berpotensi besar menjadi perang terbuka antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia Tenggara. Hal tersebut dapat dilihat dengan seringnya Tiongkok maupun Amerika

Serikat melakukan latihan perang di kawasan tersebut. Bahkan, Presiden Xi Jin-Ping saat menginspeksi *People Liberation's Army (PLA)* meminta mereka untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perang yang sesungguhnya. Pernyataan tersebut tentu saja mengindikasikan bahwa militer Tiongkok tengah bersiap menghadapi operasi perang, khususnya di wilayah LCS dan sekitarnya. Pihak Amerika Serikat melakukan latihan perang bersama Australia dan Filipina sehari setelah Tiongkok melakukan latihannya. Hal tersebut tentu saja menjadi indikasi bahwa ada potensi yang cukup besar bahwa perang bisa terjadi kapan saja di kawasan LCS (Marsetio, 2023).

1.3 Persiapan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I

Indonesia berdasarkan jarak antara batas terluar pos militer Tiongkok di LCS hanya berjarak 700 km (Sorongan, 2022). Oleh sebab itu, Indonesia membangun pangkalan militer terpadu di sekitar Laut Natuna Utara sebagai pasukan reaksi cepat dan gugus tempur laut. Kogabwilhan I pun menyiapkan beberapa unit armada kapal berbagai jenis, pesawat, dan artileri pertahanan udara yang statis dan dinamis.

Tiongkok dalam menghadapi konflik perbatasan di LCS menggunakan unsur nelayan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah dan digunakan sebagai instrumen "*proxy war*", dibantu oleh *China Coast Guard* sebagai unsur pengaman para nelayan tersebut (Junef,

2018). Keterlibatan mereka sebagai *Human Intelligent* (HUMINT) di wilayah sengketa pun terjadi saat negara anggota ASEAN melakukan latihan militer bersama India (CNN, 2023).

Indonesia dalam menghadapi konflik di kawasan, saat ini memiliki alutsista campuran yang harus mampu dijumpai kesenjangan antara produk buatan grup NATO, Rusia, Tiongkok dan negara lainnya. *Management Combat System* yang terpadu dan handal diharapkan mampu memenuhi ekspektasi para pengguna TNI-Polri sebagai unsur utama dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Dewan Ketahanan Nasional pun memiliki *grand strategy* yang dapat diimplementasikan oleh TNI dalam berbagai situasi dan kondisi peperangan modern yang bisa saja terjadi di sekitar wilayah Indonesia, ini akan berakibat mengganggu kedaulatan negara. Sesuai dengan amanat konstitusi bahwa negara bertanggung jawab terhadap seluruh tumpah darah bangsa Indonesia.

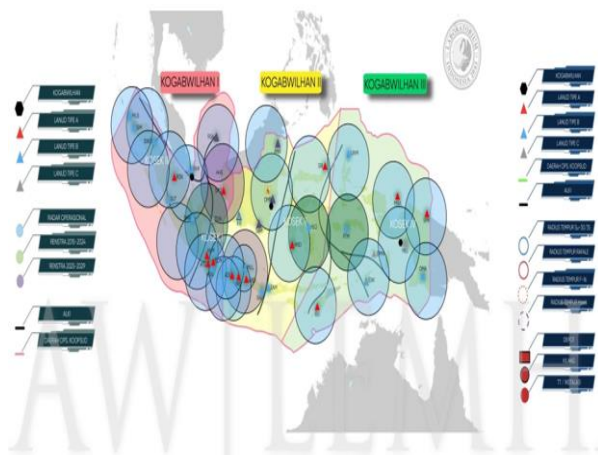
Indonesia memiliki beberapa *center of gravity* (CoG) di Jawa dan Kalimantan, Pulau Jawa diproyeksikan akan tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional dari sektor produk dan jasa. Kalimantan memiliki daerah Ibu Kota Negara baru yang diberi nama Nusantara. IKN Nusantara yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi pusat pemerintahan dan administrasi negara, hubungan diplomatik, dan lain-lain.

Indonesia memiliki 10 titik masuk dari laut, perbatasan laut menjadi titik potensial terjadinya penyusupan, infiltrasi yang dapat mengancam kedaulatan negara khususnya CoG dan objek vital nasional yang berbasis darat maupun laut (Bakrie, 2023). 10 titik masuk tersebut harus diberikan atensi lebih tidak hanya disiagakan pos angkatan laut seperti biasa tapi lebih dari itu yang lebih sesuai perkembangan teknologi terkini dalam mengintersep dan memulihkan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Proyeksi Perang pada 2030-an berdasarkan hasil analisa dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) adalah konflik LCS yang melibatkan Tiongkok sebagai negara revisionis melawan koalisi Taiwan, AS, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Australia, Vietnam, dan Jepang (Widjajanto, 2023). Bentuk perang yang kemungkinan besar terjadi adalah lintas medan, bayang-bayang nuklir, dan gelar kecerdasan buatan (AI). Pertempuran siber dan elektronik seperti serangan virus yang merusak sistem pertahanan *website* pemerintah khususnya angkatan bersenjata suatu negara yang berakibat sistem yang lumpuh dan terjadi malfungsi.

Kogabwilhan 1 bertanggung jawab apabila terjadi pertempuran di front barat yang terjadi diantara Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Dalam implementasinya meskipun akan terjadi

pembagian tugas tapi pada hakikatnya Indonesia memakai sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata). Komponen utama TNI AL, AU, dan AD didukung oleh komponen pendukung seperti Kementerian dan Lembaga setingkat Kementerian. Selain itu, komponen cadangan menjadi elemen penting dalam menjadi mata dan telinga bagi komponen utama sistem pertahanan negara. Indonesia menjadi negara dengan tingkat kerentanan yang tidak terlalu tinggi untuk sekarang, bisa jadi dalam beberapa tahun ke depan terjadi perubahan yang dinamis.



Gambar 3. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, II, dan III

Sumber : (Widjajanto, 2023).

Indonesia memiliki suatu potensi ancaman yang sangat besar di sektor maritim, AUKUS membangun kapal selam bertenaga nuklir yang dapat mengancam Indonesia dari arah selatan. Sampai sejauh ini baru ada beberapa lanal yang memiliki basis di selatan Pulau Jawa misalnya Lanal Cilacap. Lanal Bandung, Lanal Yogyakarta, dan Lanal Malang belum memiliki pangkalan di selatan Pulau

Jawa baru sebatas POSAL (Pos TNI Angkatan Laut) yang kemampuannya dibawah kelayakan sistem pertahanan negara pantai dan kepulauan terbesar di dunia. Intervensi pemerintah pusat dalam penambahan jumlah lanal beserta sarana dan prasarana nya sangat diperlukan, menyikapi konstelasi geopolitik dunia yang tidak menentu dan sulit diprediksi ditengah polarisasi baru abad 21.



Gambar 4. Peta Indonesia

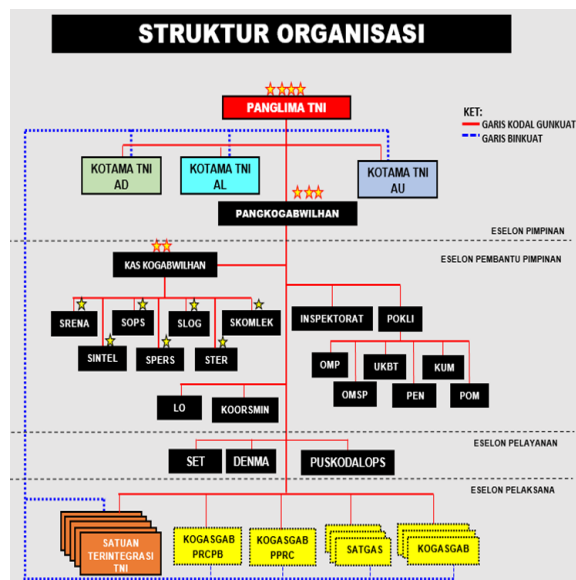
Sumber : (Kristiyanto, 2023).

Selain mempersiapkan diri dengan mempersiapkan dan memperkuat TNI, khususnya Angkatan Laut dengan sebaik mungkin dengan alutsista yang mumpuni dan seimbang dengan negara-negara yang dapat mengancam kedaulatan. Indonesia juga harus terus mendorong penyelesaian konflik di LCS melalui jalur diplomasi. Indonesia sebagai salah satu negara besar di Asia Tenggara dan merupakan ketua ASEAN pada 2023 diharapkan dapat mendorong negara-negara yang tergabung di ASEAN dan Tiongkok yang sedang berkonflik untuk menyelesaikan CoC LCS yang telah dibahas sejak 2002 dan telah

disepakati pada 2017 menjadi konvensi hukum yang mengikat satu sama lain dan saling dihormati.

Walaupun ASEAN sebagai organisasi perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, namun mereka tidak dapat menyelesaikan konflik di LCS karena konflik tersebut termasuk ke masalah masing-masing negara dan ASEAN sendiri tidak memiliki wewenang untuk memutuskan konflik klaim tersebut. Namun, dengan adanya CoC antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok diharapkan dapat menjadi pedoman untuk negara-negara yang berkonflik dalam berperilaku di kawasan LCS. Sehingga, dengan begitu terjadinya konflik terbuka yang lebih luas lagi di LCS dapat diminimalisir (Marsetio, 2023).

Indonesia memiliki konsentrasi penduduk tertinggi di Pulau Jawa secara otomatis akan menjadi CoG bagi Indonesia secara ekonomi, bukan hanya Kalimantan yang menjadi pusat gravitasi pemerintahan Indonesia. Dalam berbagai perspektif ini akan berakibat Indonesia dapat memperkuat basis pertahanan di perimeter terluar sehingga mencegah konflik meluas yang bisa menimbulkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Pertahanan berlapis ini sangat relevan untuk meminimalisir *spillover* konflik.



Gambar 5. Pangkocabwilhan

Sumber : (Dinas Penerangan Kogabwilhan 1, n.d.).

Melihat anggaran pertahanan 2023, MABES TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU masing-masing menerima Rp 11,33 triliun, Rp Rp 55,26 triliun, Rp Rp 23,62 triliun, dan Rp Rp 19,25 triliun (DPR RI, 2022). Apabila dilihat dari spektrum ancaman tentu paling depan dapat terjadi di laut dan udara, namun saat ini wilayah yang menjadi kontestasi politik internasional adalah domain laut di LCS.

Dapat disimpulkan alokasi anggaran TNI AL khususnya Koarmada 1 di bawah Kogabwilhan I, perlu mendapatkan tambahan yang proporsional terutama dalam pengadaan barang dan jasa yang bersifat strategis dalam mencegah adanya potensi infiltrasi, sabotase ataupun penyerangan objek vital nasional. Porsi anggaran pertahanan ideal dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia adalah TNI AL 40%, TNI AD 30%, dan TNI AU 30% (Haerulloh et al., 2023). Anggaran tersebut di luar anggaran Kementerian Pertahanan.

SIMPULAN

Dalam konflik LCS, Indonesia selalu menjadi negara yang terdepan untuk menyelesaikan konflik ini. Sebagai sebuah negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran strategis untuk bisa menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara dari ancaman perang terbuka di LCS. Walau begitu, konflik di LCS antara Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan. Semakin hari konflik yang terjadi di LCS terus mengalami eskalasi, hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan ancaman di kawasan Asia Tenggara.

Melihat keadaan tersebut, walaupun Indonesia bukan negara yang secara langsung terlibat konflik dengan Tiongkok di LCS, namun jika perang pecah di LCS antara Tiongkok dengan negara-negara yang berkonflik di LCS. Secara langsung maupun tidak langsung akan menarik Indonesia ke dalam konflik tersebut. Pasanya, wilayah laut Indonesia yaitu Laut Natuna Utara termasuk ke wilayah LCS sehingga Indonesia khususnya TNI harus memberikan sikap untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Dalam menghadapi situasi konflik yang semakin hari semakin tidak menentu dan sulit diprediksi, pemerintah harus mulai memperhatikan anggaran untuk memperkuat sarana dan prasarana untuk kepentingan pertahanan laut. Hal tersebut dikarenakan diperlukan keseimbangan kekuatan antara Indonesia

dengan negara-negara yang kemungkinan akan menjadi lawan potensial ketika perang terbuka terjadi di LCS.

Indonesia membutuhkan sistem pertahanan pantai berupa rudal berpemandu kendali yang dimiliki oleh setiap lantamal guna mendukung tingkat operabilitas yang tinggi sesuai arah datangnya suatu ancaman, *holding* BUMN *DEFEND ID* perlu bersinergi untuk meningkatkan fasilitas dan alutsista yang tangguh dan relevan sesuai tantangan jaman.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I menjadi tulang punggung Indonesia dalam menangkal serangan yang terjadi dari Barat, Markas di Tanjung Pinang menjadi *command center* dalam mengorganisasikan serangan untuk menangkal ancaman invasi dari luar. TNI AL menjadi unsur pertahanan utama dalam menghadapi konflik LCS yang utama dibantu dengan superioritas udara TNI AU, dan TNI AD menjadi garda terdepan pertahanan darat di wilayah kepulauan Indonesia. Unsur-unsur Komando Armada I membawahi Lantamal I Belawan, Lantamal II Padang, Lantamal III Jakarta, Lantamal IV Batam, dan Lantamal XII Pontianak. Koopsud I membawahi Skadron Udara 1, Skadron Udara 12, Skadron Udara 16, Skadron Udara 2, Skadron Udara 17, Skadron Udara 31, Skadron Udara 6, Skadron Udara 7, Skadron Udara 8, Skadron Udara 45, Skadron Teknik 021, Skadron Teknik 024, Skadron Teknik 045. Kodam Iskandar Muda, Kodam I Bukit Barisan, Kodam II Sriwijaya, Kodam III

Siliwangi, Kodam Jayakarta, Kodam IV Diponegoro, dan Kodam XII Tanjungpura (Dinas Penerangan Kogabwilhan 1, n.d.).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 39–51. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Bainus, A. (2023). *Pengenalan Konsep Keamanan dan Keamanan Nasional*.
- Bakamla. (2020). *Renstra Bakamla (2020-2024)* (1st ed.). Bakamla RI.
- Bakrie, C. (2023). *Ibu Kota Negara & Pembangunan Kekuatan Pertahanan Smart Defence Visions*.
- Buzan, B., Waever, O., & de Wilde, J. (1998). *Security*.
- Buzan, Barry., & Hansen, L. (2009). *The evolution of international security studies*. Cambridge University Press.
- CNN. (2023, May 10). *Kapal China Mondar-mandir di LCS saat ASEAN-India Latihan Militer*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230510123104-106-947685/Kapal-China-Mondar-Mandir-Di-Lcs-Saat-Asean-India-Latihan-Militer>.
- Department of State. (1952). *The Australia, New Zealand, and United States Security Treaty (ANZUS Treaty)*, 1951. <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/anzus>.
- Dinas Penerangan Kogabwilhan 1. (n.d.). *Kogabwilhan 1*.
- DPR RI. (2022, September 27). *Komisi I Setujui Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun Kementerian Pertahanan*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/ld/40936/t/Komisi-I+Setujui+Tambahan+Anggaran+Rp2%2C4+Triliun+Kementerian+Pertahanan>.
- Haerulloh, A., Prakoso, L., & Sutanto, R. (2023). Lessons Learned from the Battle in the Java Sea between the Imperial Japanese Navy and the American, British, Dutch & Australian Command Navies to Develop the Indonesian Maritime Defense. *Jurnal Pertahanan*, 9(1), 142–155. <https://doi.org/10.33172/jp.v9i1>
- Hutama, M. (2019). Intervensi Negara Ketiga dan Peran Indonesia Bersama ASEAN Pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS). *Jurnal Dinamika Global*, 4(2), 329–346.
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2023, February 28). *Dispute Territory*. Indonesia Ocean Justice Initiative.
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>
- Kristiyanto, H. (2023). *Geopolitik Bung Karno Progressive Geopolitical Coexistence*.
- Marsetio. (2023, May 29). Potensi Perang Terbuka di Laut China Selatan. *Kompas*.
- Martin, N. (2021, December 31). *RCEP*. Deutsche Welle.
- Morgenthau, H. (1949). *Politics Among Nations The Struggle For Power And Peace*. Alfred A. Knopf.
- Nugraha, O. (2021). Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(4), 25–42.
- Octavian, A. (2023, May 24). Installing ‘Maritime Guardrails’ Across Indo-Pacific Region. *The Jakarta Post*.
- Rosana, F. (2020, September 13). *Bakamla Usir Kapal Cost Guard Cina dari ZEE Natuna Utara*. <https://bisnis.tempo.co/amp/1385687/Bakamla-Usir-Kapal-Cost-Guard-Cina-Dari-Zee-Natuna-Utara>.

- SIPRI. (2019). *Data for all countries from 1988–2020 in constant USD*.
- SIPRI. (2021). *Trends in World Military Expenditure 2020*.
- SIPRI. (2022). *Trends in World Military Expenditure 2021*.
- SIPRI. (2023). *Trends in World Military Expenditure 2022*.
- Sorong, T. (2022, January 7). *Gak Jauh dari Natuna, Ini Markas Bomber Nuklir China di LCS*. CNBC Indonesia.
- Sulistiyani, Y. A., Pertiwi, A. C., & Sari, M. I. (2021). Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 12(1), 85–103. <https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149>
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. (2012). *Geopolitik Indonesia*.
- Susmoro, H. (2019). *Penamaan Laut dan Samudera Tata cara dan Implementasinya* (D. Primana, Ed.; Kedua). Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. www.pushidrosal.id
- Thontowi, J. (2018). Konflik Wilayah Laut Tiongkok Selatan dan Kejahatan Lintas Negara serta Implikasinya terhadap Ketahanan Nasional. *Jurnal Media Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0108.124-136>
- Toruan, G. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111–129. <http://www.aei.org/publication/chinas-frail-historical-claims-to->
- Umami, I. (2013). Perancangan Wisata Bahari di Pantai Boom Tuban. In *Perancangan Wisata Bahari di Pantai Boom Tuban*. UIN Malang.
- Utomo, H., Prihantoro, M., & Adriana, L. (2017). Peran Pemerintah Indonesia dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Prodi Damai Dan Resolusi Konflik*, 3(3), 63–88.
- Widjajanto, A. (2023). *Pertahanan Cerdas IKN*.